BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Menurut data Sensus Nasional Biro Pusat Statistik tahun 2003, jumlah penyandang cacat di Indonesia sebesar 0,7% dari jumlah penduduk 211.428.572 atau sebanyak 1.480.000 jiwa. Dari jumlah tersebut 21,42% diantaranya anak cacat usia sekolah (5-18 tahun) atau 317.016 anak. Dengan menggunakan data dasar tahun 2003 kemudian diproyeksikan secara proporsional, maka diperkirakan jumlah anak cacat usia sekolah pada tahun 2007 menjadi 321.000 anak. Sementara menurut statistik Sekolah Luar Biasa tahun 2006/2007 jumlah peserta didik penyandang cacat yang telah mengenyam pendidikan baru mencapai 87.801 anak. Dengan demikian, masih terdapat 233.199 (72,65%) anak cacat yang diperkirakan belum mengenyam pendidikan.¹

Banyak penyebab mengapa jumlah anak penyandang cacat yang belum tersentuh pendidikan masih tinggi, antara lain:²

1. Orang tua cenderung menyembunyikan keberadaan anaknya yang cacat di rumah, sehingga tidak mempedulikan lagi pendidikan anaknya. Hal ini dilakukan karena keluarganya malu jika terbuka aibnya, kendati mampu membiayai sekolah.
2. Orang tua masih menerapkan paradigma lama bahwa menyekolahkan anak cacat kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi.
3. Kondisi ekonomi orang tuanya memang benar-benar miskin, sehingga tidak mampu lagi membiayai sekolah anaknya. Akibatnya keluarga mengambil keputusan hanya memprioritaskan untuk membiayai kelangsungan hidupnya.

¹ Sutji Harijanto, *Mencari Keberadaan Anak Cacat untuk Memfasilitasi Pendidikannya*, 27 Juni 2008, <http://mandikdasmen.aptisi3.org>, diakses tanggal 5 September 2008

² *Ibid*

4. Belum tersedianya SLB di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, di sisi lain anak cacat tertentu memerlukan pendampingan orang tuanya ke sekolah. Hal ini menimbulkan problema baru yakni biaya transportasi menuju sekolah sangat tinggi yang membebankan orang tuanya.
5. Upaya pemenuhan hak azasi anak cacat untuk mengenyam pendidikan oleh berbagai pihak belum dilakukan secara maksimal, termasuk belum optimalnya sosialisasi pentingnya pendidikan bagi anak penyandang cacat di seluruh pelosok Indonesia.
6. Biaya satuan pendidikan bagi siswa penyandang cacat relatif lebih tinggi dibanding dengan biaya satuan pendidikan untuk siswa biasa.

Selain masalah akses pendidikan, para penyandang cacat juga harus menghadapi ketidakadilan lainnya yaitu terbatasnya interaksi sosial mereka sebagai manusia. Selama ini, satu-satunya jalan bagi penyandang cacat untuk menempuh pendidikan formal adalah melalui Sekolah Luar Biasa (SLB). Di SLB mereka mendapatkan porsi pendidikan keterampilan yang lebih besar dibandingkan bidang akademis (sekitar 52-62%). Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat membantu mereka untuk mandiri kelak. Namun tanpa disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak penyandang cacat. Belajar di SLB ini malah menjauhkan anak penyandang cacat dari masyarakat pada umumnya. Tembok eksklusifisme tersebut telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak penyandang cacat dengan anak-anak non penyandang cacat. Akibatnya penyandang cacat menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok penyandang cacat. Sementara kelompok penyandang cacat sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Menyikapi permasalahan di atas, lima tahun lalu, mengacu pada UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Indonesia mulai

diperkenalkan pendidikan inklusi. Pada Pasal 15 tentang Pendidikan Khusus disebutkan bahwa: "*Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kecacatan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.*"

Secara operasional, hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.380/C.C6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003 yang menetapkan agar setiap Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menunjuk satu SD, satu SLTP, satu SMU, dan satu SMK sebagai sekolah penerima murid-murid penyandang cacat pada saat pendaftaran siswa baru. Sehingga mulai tahun ajaran 2003/2004 program pendidikan inklusi mulai dilaksanakan di setiap kabupaten/kota. Lalu disusul dengan PP No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan setiap sekolah inklusi harus memiliki guru yang kompeten untuk menangani anak penyandang cacat.

Program pendidikan inklusi sebenarnya telah cukup lama dikenal dan dipraktekkan di negara-negara barat. Di Amerika Serikat, diperkirakan hanya sekitar 0,5% anak penyandang cacat yang bersekolah di SLB, lainnya berada di sekolah biasa (Ashman dan Elkins, 1994). Sedangkan di Inggris, pada tahun 1980-1990an saja, peserta didik di SLB diproyeksikan menurun dari sembilan juta menjadi sekitar dua juta orang.³

Definisi pendidikan inklusi terus-menerus berkembang sejalan dengan semakin mendalamnya renungan orang terhadap praktek yang ada dan sejalan dengan dilaksanakannya pendidikan inklusi dalam berbagai budaya dan konteks yang semakin luas. Definisi ini terus berkembang agar pendidikan inklusi dapat tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Berdasarkan Seminar Agra

³ Mengenal Pendidikan Inklusif, <http://www.ditplb.or.id> diakses pada tanggal 15 September 2008

yang menghimpun lebih dari 40 praktisi pendidikan inklusi dari 23 negara pada tahun 1998, pendidikan inklusi didefinisikan sebagai berikut:⁴

- Lebih luas daripada pendidikan formal: mencakup pendidikan di rumah, masyarakat, sistem non formal dan informal.
- Mengakui bahwa semua anak dapat belajar
- Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi pendidikan memenuhi kebutuhan semua anak
- Mengakui dan menghargai berbagai perbedaan pada diri anak: usia, jender, etnik, bahasa, kecacatan, status HIV/AIDS, dan lain-lain.
- Merupakan proses yang dinamis yang senantiasa berkembang sesuai dengan budaya dan konteksnya.

Pendidikan inklusi pada dasarnya ditujukan untuk semua kelompok yang termarginalisasi. Tetapi kebijakan dan praktek inklusi anak penyandang cacat telah menjadi katalisator utama untuk mengembangkan pendidikan inklusi yang efektif, fleksibel, dan tanggap terhadap keanekaragaman gaya dan kecepatan belajar.⁵ Di Indonesia, pelaksanaan pendidikan inklusi masih berfokus pada anak penyandang cacat. Hal ini tercermin pada definisi pendidikan inklusi menurut buku Kebijakan dan Pengembangan Program Pendidikan Luar Biasa yang dikeluarkan Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dikatakan bahwa pendidikan inklusi adalah: *"Pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak penyandang cacat untuk belajar bersama-sama dengan anak yang sebayanya di sekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut, sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif."*

Pendidikan inklusi dilaksanakan atas dasar keyakinan bahwa setiap anak, siapapun mereka, dapat belajar dan harus dihargai serta harus menerima pelayanan pendidikan yang ia butuhkan. Di samping itu, pendidikan

⁴ Sue Stubbs, *Pendidikan Inklusif – Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber*, (Idpnorway, 2002), hal.37

⁵ *Ibid*, hal.93

inklusi dilandasi kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak non penyandang cacat dan anak penyandang cacat yang tidak dapat dipisahkan sebagai suatu komunitas. Program pendidikan inklusi akan memungkinkan anak-anak penyandang cacat untuk lebih percaya diri dalam mengasah bakat dan potensi mereka dan belajar bersosialisasi sedini mungkin dengan lingkup masyarakat yang lebih luas.

Solidaritas, empati, penghargaan yang sama, persahabatan, dan karakter dibentuk ketika anak-anak di lingkungan yang sama dengan kemampuan yang berbeda belajar dan bermain bersama. Pun memberikan pembelajaran bagi guru, anak-anak non penyandang cacat, dan masyarakat agar lebih peka terhadap keberadaan anak-anak penyandang cacat.

I.2. Perumusan Masalah

Dalam program pendidikan inklusi, adaptasi lingkungan merupakan proses terpenting bagi siswa penyandang cacat untuk dapat diterima dan bertahan di sekolah inklusi. Ini karena anak penyandang cacat dapat memperoleh pendidikan diantaranya hanya jika: (a) Dapat bergaul dengan anak-anak lain, (b) Berkomunikasi secara tepat, dan (c) Tidak terpisah karena berbeda.⁶ Di banyak negara, adaptasi lingkungan menjadi tantangan yang besar dalam mempraktekkan pendidikan inklusi dalam sistem pendidikannya. Ini terkait dengan masalah kesadaran tentang kebutuhan anak yang berbeda-beda dan pengetahuan tentang cara memenuhi kebutuhan tersebut melalui penyesuaian lingkungan.⁷

Bila seseorang masuk dalam sebuah lingkungan sosial yang baru maka biasanya akan terjadi hambatan bagi orang tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tersebut. Apalagi anak penyandang cacat yang telah memiliki *labeling* dan stigma tersendiri dalam masyarakat, tentunya akan

⁶ *Ibid*, hal.129

⁷ *Ibid*, hal.57

menghadapi tantangan yang lebih besar dalam melalui proses adaptasi dalam suatu lingkungan yang baru.

Dalam teori *labeling* dinyatakan bahwa: "Seseorang yang diberi *label* sebagai orang yang devian, akan cenderung diperlakukan seperti orang yang devian, dan akhirnya akan menjadi devian (Thoits 1999: 134). Dengan kata lain, teori ini hendak menegaskan bahwa ketika kita sudah melabel seseorang, kita cenderung memperlakukan seseorang sesuai dengan label yang kita berikan, dan lama kelamaan tanpa disadari orang tersebut akan membentuk konsep diri sesuai label tersebut.⁸

Dari pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil akhir dari praktek labeling adalah terbentuknya sebuah konsep diri (*self concept*) sesuai dengan label yang diberikan pada dirinya. Pemikiran ini juga sejalan dengan teori *looking-glass self* yang dikemukakan oleh Charles H. Cooley (1922) yakni "Konsep diri seseorang berkembang melalui bagaimana orang lain memperlakukan dan bereaksi pada dirinya."⁹

Bagi banyak orang (termasuk anak-anak) pengalaman mendapat label tertentu (terutama yang negatif) memicu pemikiran bahwa dirinya ditolak. Pemikiran bahwa dirinya ditolak dan kemudian dibarengi oleh penolakan yang sesungguhnya, dapat menghancurkan kemampuan berinteraksi, mengurangi rasa harga diri, dan berpengaruh negatif terhadap dalam kehidupan sosialnya.¹⁰

Hal ini juga yang terjadi pada diri seorang anak penyandang cacat. Mereka telah diberikan label sebagai individu yang berbeda dan lemah, diperlakukan berbeda dan seperti orang lemah, pada akhirnya akan membentuk konsep diri sebagai orang yang berbeda dan lemah pula. Dengan

⁸ Martina Rini S. Tasmin, *Labeling*, Jakarta, 16 Mei 2002, www.e-psikologi.com/anak/160502.htm, diakses pada tanggal 15 September 2008

⁹ Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book – Ninth Edition*, (Addison Wesley Longman Inc., New York 2001), hal.60

¹⁰ Martina Rini S. Tasmin, *Labeling*, Jakarta, 16 Mei 2002, www.e-psikologi.com/anak/160502.htm, diakses pada tanggal 15 September 2008

bertindak sesuai labelnya, orang akan semakin memperlakukan anak penyandang cacat juga sesuai labelnya. Hal ini menjadi siklus melingkar yang berulang-ulang dan semakin saling menguatkan terus-menerus.

Miriam D. Skjorten, seorang asisten profesor pada Jurusan Pendidikan Kebutuhan Khusus, Universitas Oslo dan juga aktif melakukan studi perbandingan mengenai pendidikan kebutuhan khusus dalam konteks internasional dan aktivitas budaya, mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, tantangan-tantangan sosial emosional yang akan berdampak khusus pada anak-anak penyandang cacat adalah sebagai berikut:¹¹ (1) Mengembangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna yang merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran; (2) Mengembangkan hubungan pertemanan yang tulus; (3) Mengatasi kesepian; (4) Jatuh cinta dan mendapatkan respon atau tanggapan; (4) Mengembangkan harga diri yang baik.

Namun ternyata, sejauh pengamatan penulis, banyak juga anak penyandang cacat yang tidak mengalami kesulitan bergaul dengan teman-temannya di sekolah inklusi. Mereka bertahan dan tetap ingin melanjutkan pendidikannya di sekolah inklusi. Walaupun tak dipungkiri, semua anak akan mengalami masa adaptasi. Kenyataan ini tentu bertolak belakang dengan kekhawatiran semua orang dan teori yang ada. Lalu mengapa mereka bisa dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya? Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **bagaimana proses adaptasi budaya anak penyandang cacat yang bersekolah di sekolah inklusi? Dan aspek-aspek apa yang melatarbelakangi keberhasilan proses adaptasi antarbudaya tersebut?**

¹¹ Berit H. Johnsen dan Miriam D. Skjorten, *Pendidikan Kebutuhan Khusus – Sebuah Pengantar*, (Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2003), hal.58

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ada dua yakni sebagai berikut:

1. Mengkaji secara mendalam proses adaptasi antarbudaya anak penyandang cacat yang bersekolah di sekolah inklusi, dan
2. Menemukan aspek-aspek yang melatarbelakangi keberhasilan proses adaptasi siswa penyandang cacat di sekolah inklusi.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai proses adaptasi antarbudaya terutama menyangkut kelompok sub-budaya.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi orang tua, guru, dan para praktisi konseling dalam membantu proses adaptasi anak penyandang cacat di sekolah inklusi serta meningkatkan jumlah anak penyandang cacat yang belajar di sekolah inklusi.